



Pemkot Bikin Tim TPA Piyungan

■ Jadi Penghambat Sabet Adipura 2 Tahun Berturut-turut

YOGYA, TRIBUN - Sampai dua tahun berturut-turut, Pemkot Yogyakarta terus gagal menyabet predikat penghargaan lingkungan Adipura. Pasalnya, hingga saat ini masih terbentur masalah pengelolaan sampah tingkat akhir, khususnya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta, Suyana, menuturkan, pihaknya akan memberikan perhatian lebih pada pengelolaan TPA Piyungan. Pasalnya, setelah dua tahun dikelola oleh Pemda DIY, kondisi lingkungan tak juga membaik.

"Untuk itu, kami bakal menerjunkan tim yang akan mendampingi Pemda DIY untuk membantu pengelolaan TPA Piyungan, agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan standar penilaian untuk meraih Adipura kembali," ujar Suyana, Senin (22/2).

Pengelolaan sampah di TPA Piyungan menjadi salah satu penghambat dalam meraih Adipura kembali. Pa-

salnya, nilai yang diraih hanya 68, sedangkan batas penilaian minimal yang ditetapkan 72.

Masalah yang masih muncul adalah pemulung yang ada di kawasan tersebut, bahkan sapi yang memakan sampah di TPA Piyungan terus bertambah banyak. Padahal, iuran yang ditarik untuk membuang sampah ke TPA Piyungan, juga tidak sedikit, mencapai 9 miliar yang mulanya hanya Rp 3,5 miliar.

"Setelah ditinjau ternyata kualitas pengelolannya terus menurun, tim ini memang perlu Pemda DIY, untuk melakukan pendampingan," kata Suyana.

Suyana mengajukan metode pengelolaan sampah dapat menggunakan metode *controlled landfill*, dan meng-

• ke halaman 14



• Masalah pemulung yang ada di TPA

• Sapi yang memakan sampah terus bertambah

• Kualitas pengelolannya terus menurun

• Belum dipakainya metode *controlled landfill*

Hingga kini pengelolaan TPA pakai *open dumping*

GRAFIS/ULUH PRASETYA

Pemkot Bikin Tim TPA Piyungan

• Sambungan Hal 13

gantikan metode *open dumping* yang selama ini dipergunakan. Tidak semua zona akan ditutup tanah, namun zona yang tidak digunakan harus tertutup dan area terbuka merupakan area aktif digunakan.

"Selain ditutup gasnya

juga harus dikelola, harus dikeluarkan agar tidak meledak, kemudian airnya juga harus diolah. Sampah yang ada di kawasan itu memang perlu dilakukan *controlled landfill*," terangnya.

Harusnya modern

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Fursan, mengatakan, sebaiknya Pemkot tidak boleh berpangku tangan, namun juga turut serta dalam pengelolaan TPA Piyungan.

Hal itu agar sampah dapat dikelola dengan benar.

Ia mengatakan, ditilik dari besarnya iuran yang dibebankan, semesinya pengelolaan sampah di TPA Piyungan juga dapat diimbangi dengan pengelolaan yang lebih baik dan modern.

"Semestinya, dengan dana besar itu, seharusnya bisa untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern di Piyungan, bukan sebaliknya," ujar Fursan. (rft)

Instansi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005